



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU**
2. Jabatan : **BUPATI**
3. NHK : **126199**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **3.380.000.000**

1. Tanah Seluas 2860 m2 di KAB / KOTA MAGELANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah Seluas 2476 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. Tanah Seluas 9460 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 398 m2/290 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 681 m2/675 m2 di KAB / KOTA KOTA PALU , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
6. Tanah Seluas 1930 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
7. Tanah Seluas 1730 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
8. Tanah Seluas 20300 m2 di KAB / KOTA PARIGI MOUTONG, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **200.000.000**

1. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **250.000.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **4.760.445.003**



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	8.590.445.003
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	8.590.445.003

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.